

***Village Financial Management Training Based on the Siskeudes Application to Increase Accountability of Village Funds*****Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa****Nonni Yap<sup>1</sup>, Nur Laely<sup>2</sup>, Endang Triwidyati<sup>3</sup>, Eka Agustina<sup>4</sup>, Oktaviani Wahyu Prihardini<sup>5</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kadiri<sup>1,2,3,4,5</sup>nonni\_yap@unik-kediri.ac.id<sup>1</sup>, nurlaely@unik-kediri.ac.id<sup>2</sup>, endang\_triwidyati@unik-kediri.ac.id<sup>3</sup>, ekaagustina24.co.id@gmail.com<sup>4</sup>, dinioktaviani261099@gmail.com<sup>5</sup>

Disubmit : 16 Juni 2024, Diterima : 11 Juli 2024, Terbit: 11 Juli 2024

**ABSTRAK**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa wajib menyelenggarakan sistem politik tersendiri. Seiring berjalannya waktu, UU Desa telah memberikan dampak besar terhadap pembangunan desa. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah kepala dan aparat desa mendapat kritik karena gagal menegakkan hukum setempat. Penyebabnya adalah buruknya kualitas sumber daya manusia yang bertugas mengawasi keuangan desa dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi yang diperlukan kepada pengurus desa dalam mengelola keuangan desa. Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR) adalah teknik atau metode yang digunakan, dimulai dengan survei lokasi dan dilanjutkan dengan analisis masalah, perumusan solusi, pelaksanaan pelatihan, dan penilaian. Diketahui bahwa dengan terlibat dalam acara-acara ini, para peserta memperluas pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan desa dan memberikan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Pejabat desa mungkin akan lebih mudah melaporkan keuangan desa dengan bantuan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga memastikan dana yang dilaporkan transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci** : Akuntansi Pemerintahan; SISKEUDES; Akuntansi Desa**ABSTRACT**

According to Law Number 6 of 2014, village governments are required to organize a separate political system. Over time, the Village Law has had a major impact on village development. However, it cannot be denied that a number of village heads and officials have received criticism for failing to enforce local laws. The cause is the poor quality of human resources tasked with overseeing village finances and a lack of understanding of regulations. The aim of this event is to provide the necessary information and education to village administrators in managing village finances. Participatory Action Research (PAR) is a technique or method used, starting with a site survey and continuing with problem analysis, solution formulation, training implementation, and assessment. It is known that by being involved in these events, participants broaden their understanding of village financial management and provide answers to the problems they face. Village officials may find it easier to report village finances with the help of the Village Financial System (SISKEUDES), thereby ensuring that the funds reported are transparent and accountable.

**Keywords**: Government Accounting; SISKEUDES; Village Accounting**1. Pendahuluan**

Desa adalah komunitas hukum dengan wilayah dan otoritas dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia tanggungjawab atas urusan pemerintahan,

kepentingan lokal melalui upaya komunitas, dan hak asli atau hak tradisional yang dihormati (Ridwan, 2019). Selain mengeluarkan Undang-Undang Pasal 1 ayat 6 Peraturan tersebut mengklaim bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan Menurut BPKP (2020), Perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pelaporan adalah semua bagian dari administrasi keuangan desa. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel menjadi lebih penting, terutama setelah pemerintah pusat memberikan dana yang signifikan untuk desa. Pembangunan infrastruktur dan dana Desa yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi Siskeudes, juga dikenal sebagai Sistem Keuangan Desa, dimaksudkan untuk membantu sistem desa mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan membuat lebih mudah untuk memberikan informasi tentang keuangan mereka.

Keterbatasan Pengetahuan dengan banyak pengelola keuangan desa mungkin kurang familiar dengan prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. tingginya tingkat penyalahgunaan Dana Desa: Penyalahgunaan dana desa masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan lokal dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam manajemen keuangan, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Desa untuk memastikan dana digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.

Menurut Abdullah dan Samad (2019), desa adalah wilayah terkecil dari semua tingkat organisasi negara. Desa terdiri dari banyak komunitas kecil yang mendorong pembentukan dua pemerintah negara bagian, berbeda dengan kota. Ketika desa berkembang, mereka dapat mengelola dana dan menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Setiap dusun diberi kebebasan penuh untuk menyusun laporan keuangan mereka sendiri. Pemerintahan desa akan membuat laporan keuangan untuk digunakan sebagai referensi untuk menghitung budget tahun setelahnya. Oleh karena itu, keuangan desa harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan kemajuan TI.

Pengelolaan finansial adalah tahapan pengelolaan keuangan itu sendiri yang diperlukan untuk membangun pengelolaan keuangan lokal yang efisien dan efektif (Puspasari dan Purnama, 2018). Tahapan pengelolaan keuangan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Distrik telah mengelola sejumlah besar uang negara. Berdasarkan keadaan saat ini untuk mencapai Untuk meningkatkan manajemen keuangan desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa dimulai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peraturan sebelumnya tentang pengelolaan keuangan desa adalah Mendagri No. 114/2014, Pengelolaan Keuangan Desa (Malahika dkk., 2018). Pengawasan keuangan desa meliputi semua tindakan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang berlaku selama satu tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penyaluran dana sangat penting karena pengalokasian dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Ini karena ada risiko administratif dan substantif yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa, yang dapat menyebabkan masalah hukum karena aparat desa tidak memadai dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pratiwi & Muliasari, 2020) Kepala desa dan perangkat desa sering menghadapi masalah dalam mengawasi keuangan desa, khususnya dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana karena mereka tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang cukup. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa masalah dengan mengelola

keuangan desa termasuk akses yang terbatas dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, karena pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan Permen No. 113 Tahun 2014 (Djauhar dkk., 2020).

Kementerian Dalam Negeri dan BPKP sedang berusaha menanggapi keresahan yang diajukan oleh banyak orang, terutama pemerintah desa, terkena dampak dari "banjir dana" ini. Tujuan Salah satu tujuan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah untuk memberikan dukungan dalam manajemen keuangan desa.

Siskeudes tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan, tetapi juga berfungsi sebagai pengaturan dan tolak ukur untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa tetap dalam batas-batas peraturan undang-undang. Siskeudes adalah upaya besar untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Karena dana yang signifikan ini diberikan kepada pemerintah, pemerintah desa secara tidak langsung dipaksa untuk mengintegrasikan, meningkatkan kinerja karyawan perangkat desa, dan merevisi tanggung jawab pengelolaan keuangan mereka berasal dari sumber utama, masyarakat, maka masyarakat juga bertanggung jawab.

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan otonomi desa adalah tata kepemimpinan yang baik dan tepat dari pemerintah; kepemimpinan perusahaan yang baik adalah istilah lain untuk tata kelola yang baik. Sembilan prinsip GCG, menurut Ubaedillah 2018 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, orientasi kesepakatan, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Namun, pengelolaan siskeudes di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, masih belum optimal. Indikator-indikator berikut menunjukkan bahwa kelengkapan sistem siskeudes belum optimal. Sebagai contoh, beberapa bagian sistem belum lengkap, sehingga tidak ada bidang kegiatan dan sub kegiatan yang harus ada menurut peraturan pengelolaan keuangan.

1. Meskipun Aplikasi Siskeudes, yang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belum diubah karena Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 Mengelola Keuangan Desa. Namun, pihak berwenang belum melakukan perubahan pada aplikasi tersebut

2. Operator pengelola sistem keuangan desa tidak memahami proses pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada siskeudes.

3. Karena mereka tidak memahami parameter bidang dan kegiatan dalam aplikasi siskeudes, operator pengelola sistem keuangan desa bingung saat mengisi kegiatan dan belanja desa.

Desa Kepatihan terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Kepatihan menjadi objek yang dipilih untuk pelatihan dan pendampingan ini karena Desa Kepatihan pada tahun 2022 terjadi pergantian Kepala Desa beserta aparturnya. Sebagaimana hasil survey awal yang dilakukan melalui pertemuan dan diskusi mendalam dengan Kepala Desa Kepatihan mengenai kondisi akuntabilitas keuangan Desa Kepatihan serta permasalahan maupun kesulitan mengenai keuangan desa yang dihadapi saat ini, yang mana kondisi pencatatan keuangan dan sisi pelaporan keuangan Desa Kepatihan masih kurang tersistematis karena SDM yang kurang kompeten di bidangnya, sehingga menjadi langkah yang tepat mengenai adanya pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa Kepatihan dari segi akuntansinya demi terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu juga diadakan praktik penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang diberikan secara gratis ke setiap desa di seluruh Indonesia, adalah alat pengendali yang aman dan bebas dari intervensi kepentingan karena langsung diawasi oleh BPKP dan Kemendagri. Tujuan dari SISKEUDES adalah untuk menjamin akuntabilitas, keteraturan administrasi, keamanan keuangan, dan pengurangan masalah hukum yang terkait dengan korupsi.

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana sistem keuangan desa Desa Kepatihan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berfungsi?

2. Bagaimana masalah yang dihadapi Desa Kepatihan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik saat menjalankan sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi siskeudes?
3. Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengelola finansial Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang berbasis aplikasi siskeudes?

**2. Metode**

1) Desain Penelitian:

Metode kuantitatif digunakan dalam desain penelitian campuran. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pelatihan dan penggunaan aplikasi Siskeudes.

2) Populasi dan Sampel:

Untuk memastikan representasi, sampel dari populasi penelitian ini dipilih secara acak dari desa-desa di Kabupaten X yang menerima dana desa.

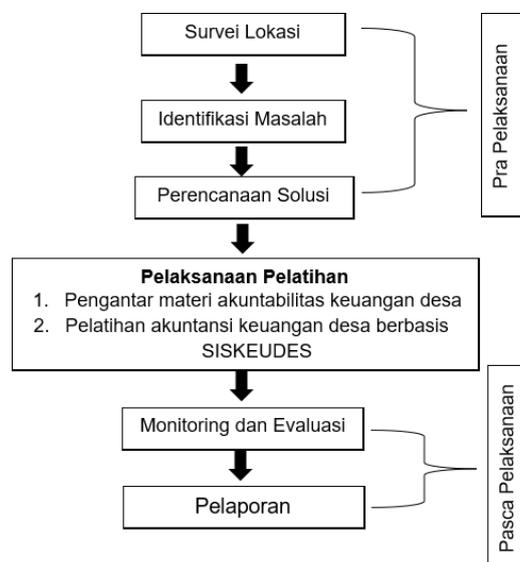
Prosedur Pelatihan:

Pelatihan dilakukan dalam beberapa sesi yang mencakup teori pengelolaan keuangan desa, penggunaan aplikasi Siskeudes, dan studi kasus praktis. Setiap sesi diikuti oleh evaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta.

3) Alat dan Metode Pengumpulan Informasi

Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam. selama pelatihan. Kuesioner digunakan untuk mengukur pengetahuan awal dan akhir peserta, sementara wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pengalaman peserta selama pelatihan.

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan yang digunakan untuk pelatihan dan pendampingan saat ini. PAR menyadarkan masyarakat tentang masalah yang ada dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan yang akan dilakukan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Metode ini dipilih karena sesuai dengan situasi dan tuntutan masyarakat saat ini di Desa Kepatihan terkait dengan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 9 Oktober 2023, di Balai Desa Kepatihan berada di Kecamatan Menganti, yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Pengabdian

Menurut George R. Terry dalam Agus (2015: 36), faktor-faktor yang diukur dalam pengelolaan adalah seperti berikut ini :

1. Perencanaan:

Penentuan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan siapa yang mengerjakannya. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tersirat dalam perencanaan.

2. Pengorganisasian

Proses mendisain organisasi, yang biasanya dilakukan setelah perencanaan, adalah langkah pertama dalam pengorganisasian yang sangat penting. Proses ini menentukan struktur perusahaan yang paling cocok dengan strategi, staf, teknologi, dan tanggung jawab organisasi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana dapat dilakukan dengan efektif dan produktif, proses ini bertujuan untuk menggabungkan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang tersedia. Menggerakkan proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Pengendalian:

Upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan dan merancang sistem umpan balik informasi nyata berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dikenal sebagai pengendalian.

Siskeudes adalah aplikasi berbasis komputer yang dimaksudkan untuk membantu perangkat desa menjalankan keuangan mereka. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti pembukuan, pelaporan, dan analisis keuangan yang memudahkan pengguna dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Dimensi di atas digunakan untuk mengukur pengelolaan dalam penyediaan layanan sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal. Terry (2012: 3) mendefinisikan "usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain". Keuangan Desa, menurut UU Desa No. 06 Tahun 2014, terdiri dari semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai secara moneter, serta semua barang dan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban yang disebutkan pada ayat (1) memiliki wewenang untuk mengumpulkan pendapatan, mengeluarkan uang, dan mengelola keuangan Desa. Aplikasi untuk Sistem Keuangan Desa telah dibuat. Aplikasi Siskeudes ini portabel dan mudah digunakan bahkan oleh pengguna aplikasi awam karena menggunakan database Microsoft Access. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam kategori skala kecil. Oleh karena itu, aplikasi yang bekerja dengan database SQLServer hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu atau setelah sejumlah transaksi selesai.

Aplikasi keuangan desa dapat menggunakan dua cara: koneksi ODBC (Open Database Connectivity) atau koneksi langsung di interface koneksi data. Yang pertama menggunakan mesin ODBC yang ada di sistem operasi Windows untuk membaca data, dan yang kedua menggunakan Driver MsAccess untuk membaca data.

### 3. Hasil Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola sistem keuangan desa yang didasarkan pada Program Siskeudes adalah sebagai berikut:

- 1) Agar keputusan musyawarah desa diterima secara luas, pemerintah desa dapat memilih peserta dan tim penyusunnya dengan lebih fleksibel.
- 2) Pemerintah desa bekerja sama dengan pihak kabupaten dalam hal topik dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Aplikasi SISKEUDES, dan aparat desa berupaya membuat laporan pertanggungjawaban dengan cepat dan berkoordinasi dengan semua aparat desa lainnya.
- 3) Kepala Desa berusaha memberikan bimbingan yang lebih langsung ke Aparatur Pemerintah Desa dan menghargai kaur dan kasi yang bekerja dengan baik.

4) Sekretaris Desa berusaha untuk meningkatkan cara mereka berkomunikasi dan mendapatkan informasi, serta berbagi informasi dengan sekretaris desa lainnya. Pemerintah Desa memeriksa kembali semua bukti pendukung untuk setiap laporan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, pemerintah desa Kapatihan pada dasarnya telah berusaha untuk menghilangkan rintangan untuk sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis siskeudes. Untuk mencapai tujuan ini, mereka telah memberikan instruksi kepada aparatur pemerintah desa untuk mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) masuk ke sistem menggunakan identitas user dan password desa
- 2) setelah log in, pilih
- 3) Menu Perencanaan: Restra Desa, RPJMDesa, dan RKPDesa memasukkan data perencanaan desa ke siskeudes.

4) Menu Penganggaran: Proses pengumpulan data digunakan untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Oktober 2023 dimulai pada pukul 08.00 WIB – Selesai. Tim pelaksana terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, sedangkan peserta pelatihan terdiri dari:

- 1) Aparatur Desa, Desa Kapatihan
- 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kapatihan
- 3) Karang Taruna Desa Kapatihan, serta 4) Tim Penggerak PKK Desa Kapatihan.



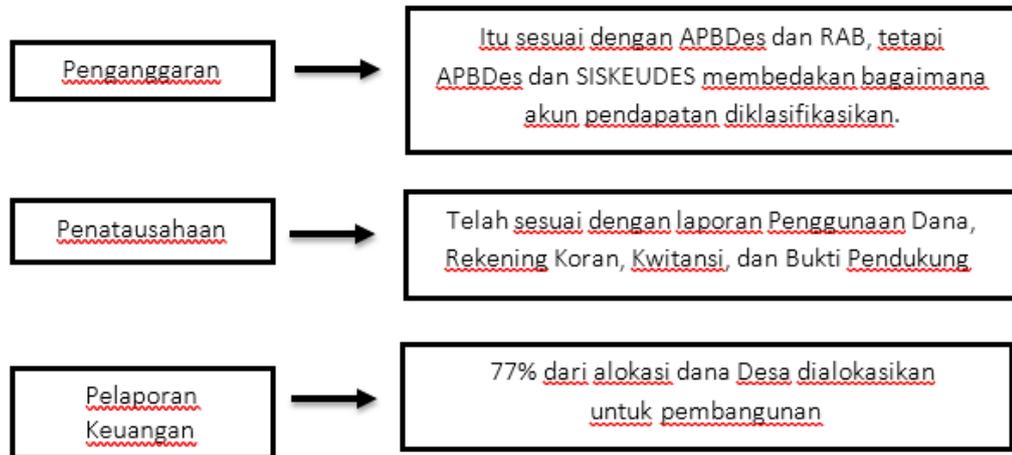
Gambar 2. Sambutan oleh Kepala Desa Kapatihan

Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Desa Kapatihan, Bapak H. Dodik Soeprayogi, dalam sambutannya dia merasa bangga dan bersyukur atas diadakannya pelatihan akuntansi desa ini, dengan harapan semoga sistem keuangan Desa Kapatihan bisa semakin baik kedepannya dengan meningkatnya kompetensi SDM di Desa Kapatihan, terutama di bagian keuangan (bendahara).

## **Pembahasan**

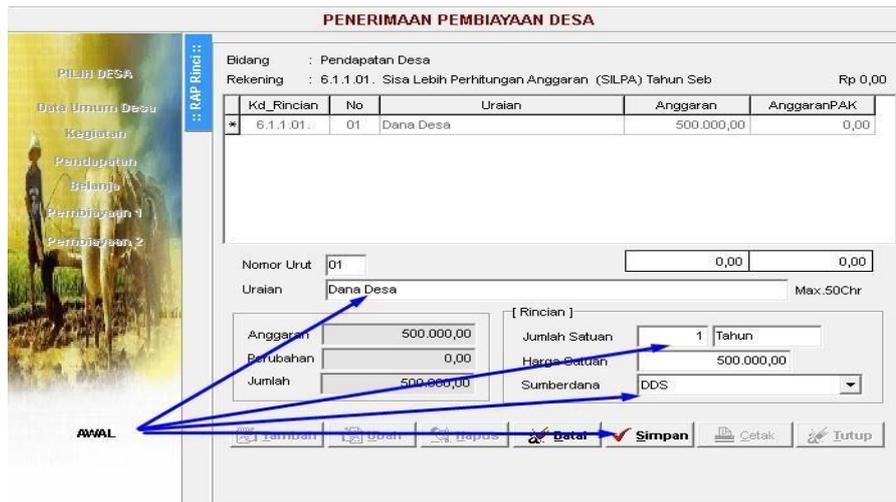
### **Pengendalian Keuangan Desa dengan SISKEUDES :**

Pengoperasian SISKEUDES di Desa Kepatihan telah memenuhi syarat untuk anggaran, usaha, dan laporan. Gambar 3 menunjukkan gambaran singkat tentang pengelolaan keuangan SISKEUDES di Desa Kepatihan.



Gambar 3. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan pembuatan APBDes dan RAB, yang terdiri dari RAB Dana Desa dan RAB Alokasi Dana Desa. Penganggaran yang dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES didasarkan pada data dari APBDes dan RAB ini; namun, akun Alokasi Dana Desa di APBDes dibagi menjadi alokasi & Penghasilan tetap. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan contoh data anggaran pendapatan desa yang dimasukkan ke SISKEUDES:



Gambar 4. Aplikasi SISKEUDES

Berikut adalah beberapa poin yang dibahas antara SISKEUDES dan pengelolaan keuangan desa:

1. Pendataan dan Perencanaan: Catatan dan perencanaan yang baik dari pendapatan dan belanja desa penting untuk pengelolaan keuangan desa.

2. Pencatatan Transaksi: Aplikasi ini memudahkan pencatatan semua transaksi keuangan desa, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Ini membantu desa mengelola anggaran dengan lebih baik.
3. Pengawasan dan Pemeriksaan: Proses pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting. Audit internal dan eksternal yang berkala memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku adalah cara untuk melakukannya.
4. Pelaporan Keuangan: SISKEUDES menyediakan fitur untuk membuat laporan keuangan secara berkala. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat untuk melacak kinerja keuangan desa dan memenuhi persyaratan pelaporan kepada pihak yang berwenang.
5. Pengendalian Anggaran: SISKEUDES memudahkan pemerintah desa untuk mengelola anggaran. Mereka dapat melacak penggunaan anggaran secara real-time dan menilai program.
6. Manajemen Aset: SISKEUDES membantu mengelola aset desa selain mengelola transaksi keuangan. Pencatatan aset dan inventaris barang milik desa termasuk dalam hal ini.
7. Peningkatan Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan desa dapat lebih diawasi dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dan transparan seperti SISKEUDES\
8. Pelayanan: Penggunaan SISKEUDES memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Akibatnya, penggunaan SISKEUDES membawa manfaat besar dalam pengelolaan keuangan desa, memberi desa kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa dengan lebih baik untuk mencapai kemajuan berkelanjutan.
9. Evaluasi dan Perbaikan: Kinerja keuangan desa harus dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian keuangan desa saat ini.

Dengan menerapkan SISKEUDES secara efektif dan teratur, diharapkan pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih jelas, akuntabel, dan efisien, dan akan memaksimalkan manfaatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## 5. Penutup

Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik adalah lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kadiri pada hari Senin, 9 Oktober 2023 dengan tema "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa". Pelatihan ini berjalan dengan lancar dengan pemateri yang kompeten di bidangnya yakni Syaiful Amri selaku operator Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Menganti.

1) Penulis telah melakukan penelitian tentang Pengelolaan Sistem Keuangan Desa yang Berdasarkan SISKEUDES Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem belum berjalan dengan baik secara keseluruhan. Ini bertentangan sesuai dengan gagasan Terry (Agus, 2015: 36) bahwa perencanaan, pengawasan, dan pengendalian adalah komponen utama pengelolaan organisasi. Perencanaan bidang dan kegiatan serta perencanaan pembangunan desa adalah dua indikator yang memiliki kelemahan

yang jelas. Adanya masalah tambahan adalah ketidakmampuan kaur dan kasi dalam membuat laporan kewajiban dan ketidakmampuan mereka untuk memahami tanggung jawab dan fungsi yang diberikan. Selain itu, pemerintah Desa Kepatihan menghadapi masalah dalam mengelola sistem keuangan desa yang digunakan melalui aplikasi SISKEUDES. Salah satu masalahnya adalah Sekretaris Desa tidak dapat bertindak sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

2) Dalam mengelola Pemerintah Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mengoperasikan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES menghadapi beberapa masalah. Misalnya, tim penyusun tidak memahami SISKEUDES tidak memiliki kode rekening atau bidang kegiatan dan tidak memberikan hasil musyawarah desa, dan kepala desa belum memberikan arahan kepada kaur dan kasi tentang tugas, pokok, dan fungsinya.

3) Pemerintah Desa Kepatihan, yang berada di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, telah melakukan upaya untuk menghilangkan rintangan yang dihadapi dalam menjalankan Sistem Keuangan Desa berbasis SISKEUDES. Upaya ini telah menghasilkan pemerintah desa menjadi lebih selektif dalam memilih anggota musyawarah desa dan tim penyusun. Dalam hal-hal dan aktivitas yang tidak disebutkan dalam Aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa bekerja sama dengan pihak kabupaten. Selain itu, lembaga pemerintahan desa berusaha membuat laporan pertanggungjawaban lebih cepat, dan kepala desa berusaha menggunakan pendekatan yang lebih personal untuk memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa. Selain itu, kepala desa berusaha memberikan penghargaan atau penghargaan kepada kaur dan kasi yang berprestasi. Pemerintah Desa dan Sekretaris Desa tidak hanya berusaha meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga berusaha mengumpulkan semua bukti yang mendukung setiap laporan pertanggungjawaban.

#### Daftar Pustaka

- Alamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., dan Rahman, Z. (2022). Organisasi yang Jurnal Dikmas: Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, Vol. 2, No. 1, 41, Keuangan Desa, <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.41-48.2022>.
- Djauhar, A., Manan, L. O. A., dan Awit, D. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic and Business of Sultra*, 1(2), 105–119. Sumber informasi: <https://doi.org/10.54297/sjeb.vol1.iss2.137>
- Martini, Agustin, Fairuzdita, dan Murinda (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916>
- Mulyani, H. S., Suparto, L., Sudirno, D., Masduki, & Prihartini, E. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji
- Sistem Informasi Akuntansi ditulis oleh Mulyadi di Jakarta oleh Salemba Empat pada tahun 2016. Kabupaten Majalengka. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, alih bahasa Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- S, N. L. H., & Ishak, P. (2021). Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593>